

ABSTRAK

Penelitian **ini dilatar belakangi** oleh Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keefektifitasannya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Jika Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tersebut berpotensi mengurangi alokasi tersebut menjadi dibawah 20% sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka akan timbul konflik terhadap norma. Di sisi lain, amanat UUD 1945 harus diprioritaskan sebagai dasar hukum yang tertinggi di negara Indonesia agar sesuai dengan hak kontitusi warga negara Indonesia dalam dasar konstitusi negara Indonesia. Oleh kareana itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran dana pendidikan terhadap hak konstitusional warga negara dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Kebijakan Anggaran Pendidikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang terkait.

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian** hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini lebih banyak berkutat pada studi dokumen dan literatur hukum yang memiliki fokus pada norma hukum. Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*). Dalam metode ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah hak konstitusional warga negara atas pendidikan terancam keberadaannya akibat implikasi kebijakan efisiensi anggaran baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang dinilai kurang mengedepankan kesejahteraan bangsa Indonesia. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran pendidikan, berpotensi melanggar amanat UUD NRI 1945. Total anggaran pendidikan untuk 2025 dilaporkan belum mencapai 20% dari APBN (sekitar Rp724 triliun), yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan konstitusi.

Kata Kunci : Kebijakan Efisiensi, Anggaran Pendidikan, Hak Konstitusional Warga Negara

ABSTRACT

*This study is **motivated by** education budget efficiency policies that raise concerns about their effectiveness in fulfilling the constitutional rights of citizens. If Presidential Instruction No. 1 of 2025 has the potential to reduce the allocation to below 20%, as stipulated by Article 28C, paragraph (1), of the 1945 Constitution, then a conflict with the norm will arise. On the other hand, the mandate of the 1945 Constitution must be prioritised as the highest legal basis in the Republic of Indonesia, aligning with the constitutional rights of Indonesian citizens as enshrined in the country's constitutional foundation. Therefore, this study was conducted to identify and analyse the implications of the education budget efficiency policy on the constitutional rights of citizens and to assess the compliance of the Education Budget Policy with the 1945 Constitution and related legislation.*

*This study employs a **normative legal research** method, focusing on the analysis of legal regulations and related legal documents. This study primarily involves analysing documents and legal literature with a focus on legal norms. The research employs a conceptual approach and a statutory approach. In this method, the researcher must understand the hierarchy and principles within legal regulations.*

***The results** of this research indicate that citizens' constitutional right to education is threatened by the implications of budget efficiency policies at the primary, secondary, and higher education levels, which are considered to prioritise the welfare of the Indonesian people. Presidential Instruction No. 1 of 2025, which mandates budget efficiency in education, may potentially violate the mandate of the 1945 Constitution. The total education budget for 2025 is reported to have not reached 20% of the State Budget (approximately Rp trillion), indicating a discrepancy with the constitution.*

Keywords: *Efficiency Policy, Education Budget, Constitutional Rights of Citizens*